Journal of Aafiyah Health Research (JAHR) 2024. Vol. 5, No. 2. Page 191-198
https://doi.org/10.52103/jahr.v5i2.1693
P-ISSN: 2722-4929, E-ISSN: 2722-4945

JOURNAL OF AAFIYAH HEALTH RESEARCH (JAHR)

Publisher: *Postgraduate Program, Universitas Muslim Indonesia*
Journal Homepage:
http://pascaumi.ac.id/index.php/jahr/index

Original Article

Analisis Kepatuhan Pembayaran Iuran Peserta BPJS Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dalam Pemanfaatan Layanan Kesehatan di Kelurahan Bosso Tahun 2023

*Andi Muhammad Multazam, Andi Dindha Batari Ramadhani, Fairus Prihatin Idris

Program Magister Kesehatan Masyarakat, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

Article History
Received: 30 January 2024
Revised: 20 February 2024
Accepted: 20 March 2024

Keywords: Kepatuhan Pembayaran; BPJS; Pemanfaatan; Layanan Kesehatan

Corresponding Author:
E-mail:
andimuh.multazam@umi.ac.id
Address: Jalan. Urip Sumeharjo, No. 5, 90231, Makassar, South Sulawesi, Indonesia

ABSTRAK

Latar Belakang: Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia dijalankan oleh BPJS Kesehatan, bertujuan meningkatkan kesadaran hidup sehat. Namun, masih terdapat tantangan dalam kepatuhan membayar iuran, terutama pada peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Berdasarkan data BPJS Kesehatan pertanggal 30 Juni 2023 tercatat sebanyak 257.375.800 jiwa telah menjadi peserta BPJS Kesehatan dan sekitar 12,13% merupakan peserta kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Kecamatan Walenrang Utara memiliki 1 Kelurahan dan 10 Desa. Dari data sekunder yang diperoleh menunjukkan bahwa dari 4.511 jiwa Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang terdaftar di Kecamatan Walenrang Utara, peserta terbanyak ada di Kelurahan Bosso dengan total peserta sebanyak 774 jiwa.
Tujuan: Untuk menganalisis pengaruh faktor *social structure*, *health beliefs*, dan *perceived* dengan kepatuhan pembayaran iuran peserta BPJS Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dalam pemanfaatan layanan kesehatan di Kelurahan Bosso.
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan desain *cross sectional*. Total sampel adalah 110 responden.
Hasil: Ada pengaruh yang signifikan *social structure*, *health beliefs*, dan *perceived* terhadap kepatuhan pembayaran iuran BPJS bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dengan nilai P sebesar 0,000 < α (0,05), serta variabel yang paling dominan memiliki pengaruh adalah *health beliefs* dengan nilai P < 0,25.
Saran: Pihak BPJS Kesehatan perlu melakukan pendekatan komunikatif yang lebih efektif dengan peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), terutama dalam menggali dan memahami kebutuhan masyarakat serta memberikan informasi yang lebih jelas dan komprehensif tentang pentingnya kepatuhan pembayaran iuran.

ABSTRACT

Background: The National Health Insurance (JKN) program in Indonesia, run by BPJS Kesehatan, aims to increase awareness of healthy living. However, there are still challenges in compliance with paying contributions, especially for Non-Recipient Workers (PBPU) participants. Based on BPJS Health data dated June 30, 2023, there were 257,375,800 people who had become BPJS Health participants and around 12.13% were Non-Recipient Workers (PBPU) category participants. North Walenrang Sub-district has 1 Kelurahan and 10 Villages. From the secondary data obtained, it shows that of the 4,511 Non-Recipient Wage Worker (PBPU) participants registered in North Walenrang Sub-district, the most participants are in Bosso Village with a total of 774 participants.
Objective: To analyze the influence of social structure, health beliefs, and perceived factors with compliance with payment of contributions for BPJS Non-Recipient Workers (PBPU) participants in utilizing health services in Bosso Village.
Method: This study is a quantitative study with a cross sectional design approach. The total sample was 110 respondents.
Results: There is a significant influence of social structure, health beliefs, and perceived on compliance with payment of BPJS contributions for Non-Recipient Workers (PBPU) participants with a P value of 0.000 < α (0.05), and the most dominant variable that has an influence is health beliefs with a P value < 0.25.
Suggestion: BPJS Kesehatan needs to take a more effective communicative approach with Non-Recipient Wage Worker (PBPU) participants, especially in exploring and understanding the needs of the community and providing clearer and more comprehensive information about the importance of contribution payment compliance.

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

PENDAHULUAN

BPJS Kesehatan menjadi satu-satunya Badan Hukum Publik di Indonesia yang menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (Program JKN-KIS) terhitung sejak 1 Januari 2014 (1). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang disingkat BPJS merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial (2). *Universal Health Coverage* (UHC) menunjukkan pada tahun 2019, lebih dari 930 juta orang (12% dari populasi dunia) menghabiskan setidaknya 10% dari anggaran rumah tangga mereka untuk membayar perawatan kesehatan (3).

Berdasarkan data BPJS Kesehatan pertanggal 30 Juni 2023 tercatat sebanyak 257.375.800 jiwa telah menjadi peserta BPJS Kesehatan. 44,76% peserta PBI APBN, 16,93% peserta PBI APBD, 16,86% PPU – BU, 12,13% PBPU, 7,54% PPU – PN, dan 1,78% Bukan Pekerja. Data dari website *system monitoring* terpadu Dewan Jaminan Sosial Nasional Republik Indonesia menunjukkan bahwa persentase cakupan kepesertaan JKN pada tahun 2021 masih sekitar 86,96% dengan peserta yang memiliki status kepesertaan tidak aktif sejumlah 48.723.718 jiwa. Kategori peserta JKN PBI atau yang iurannya dibayarkan pemerintah sejumlah 59,6% dan non PBI atau Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) mandiri sebanyak 40,4% yang menunggak bayar. Tunggakan tersebut disinyalir disebabkan oleh *law enforcement* lemah baik pusat maupun daerah, pendataan yang masih buruk, dan *moral hazard* dari masyarakat (4).

Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) merupakan jenis kepesertaan yang bekerja mandiri dan iurannya dibiayai oleh peserta yang bersangkutan (5). PBPU didefinisikan sebagai peserta mampu, namun pada realitanya masih banyak penduduk miskin yang mendaftar sebagai PBPU karena tidak masuk dalam skema yang dibantu pemerintah PBI, dan begitu sebaliknya, penduduk mampu banyak terdaftar sebagai peserta PBI (PKMK FK-KMK UGM, 2020). Pihak BPJS Kesehatan menyatakan bahwa jumlah peserta menunggak mencapai 10 juta jiwa dengan kategori yang paling banyak menunggak adalah PBPU (6).

Peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN – KIS) atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terdaftar di Wilayah Sulselbartramal pada tahun 2019 telah mencapai 12.147.278 jiwa atau 79,11% dari total jumlah penduduk. Di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terdaftar sebagai peserta telah mencapai 7.787.844 jiwa atau 82,44% dari total jumlah penduduk Sulawesi Selatan (7). Data sekunder yang diperoleh dari Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Palopo, Sulawesi Selatan peserta BPJS kategori PBPU atau mandiri yang memiliki tunggakan pertanggal 30 Juni 2023 tercatat sebanyak 60.814 jiwa dari seluruh total peserta PBPU yang terdaftar di wilayah kerja Kantor BPJS Cabang Palopo. Kota Palopo sebanyak 6.725 jiwa peserta menunggak, Kabupaten Luwu sebanyak 19.526 jiwa peserta menunggak, Kabupaten Luwu Utara sebanyak 27.860 jiwa peserta menunggak, dan Kabupaten Luwu Timur sebanyak 6.703 jiwa peserta menunggak (BPJS Kesehatan Cabang Palopo, 2023).

Berdasarkan data sekunder yang telah diperoleh, Kabupaten Luwu merupakan Kabupaten yang memiliki peserta menunggak terbanyak kedua setelah Kabupaten Luwu Utara. Total tunggakan Kabupaten Luwu yaitu mencapai Rp14.729.471.631 (BPJS Kesehatan Cabang Palopo, 2023). Kepatuhan dalam membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi peserta PBPU atau mandiri merupakan komponen terpenting untuk mempermudah pemanfaatan layanan kesehatan (8). Pemberian layanan kesehatan bagi peserta mandiri JKN sangat ditentukan oleh kepatuhan dalam membayar iuran setiap bulannya. Beberapa faktor tersebut yaitu *predisposing factors* yang mencakup *social structure* (struktur sosial) dan *health belief* (kepercayaan akan kesehatannya), dan juga ada *need factors* yang mencakup *perceived* (persepsi) akan sehat dan sakit itu sendiri (9).

Social structure merupakan suatu tingkatan yang ada dalam masyarakat yang memiliki peran sosial yang saling berkaitan dan menentukan pola perilaku serta peran yang dijalankan seseorang dalam masyarakat. Kecamatan Walenrang Utara merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai Petani dan memiliki tingkat pendidikan rata-rata tamat SD/SMP. *Social structure* atau struktur sosial tentunya memiliki peran sebagai penekan atau antisipasi adanya pelanggaran terhadap norma-norma atau nilai dan peraturan yang ada dalam masyarakat.

Health beliefs atau sikap kepercayaan terhadap layanan kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam untuk menganalisis upaya pemanfaatan layanan kesehatan seseorang. Melakukan pemeriksaan rutin saat tidak merasakan sakit, itu merupakan bentuk pencegahan yang bisa dilakukan untuk diri sendiri maupun keluarga. Pada kenyataannya yang banyak ditemukan di lapangan, masyarakat cenderung hanya akan memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan itu saat mereka merasakan sakit saja. Masyarakat pedesaan masih banyak yang menganggap

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

kalau memeriksakan kesehatan disaat tidak merasakan sakit itu sama halnya dengan membuang-buang waktu semata. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Junaidi (2020) menunjukkan adanya hubungan antara sikap kepercayaan masyarakat dengan pemanfaatan layanan kesehatan di Puskesmas dengan nilai p= 0,000 <α (0,05) (10).

Perceived atau persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi mengenai apa yang ada disekitarnya. Menurut Mujiati dan Pradono (2018) Persepsi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor psikologis, faktor fisik, dan image yang terbentuk yang pada akhirnya, harapan dan persepsi akan berhubungan tingkat kepuasan seseorang terhadap suatu pelayanan (11).

Kecamatan Walenrang Utara merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Luwu dengan total tunggakan peserta PBPU mencapai Rp583.183.826 dengan peserta BPJS kategori PBPU yang terdaftar pertanggal 30 Juni 2023 itu sebanyak 4.511 jiwa dan peserta kategori PBPU atau mandiri yang menunggak yaitu sebanyak 1.160 jiwa. Kecamatan Walenrang Utara menjadi Kecamatan ke-8 tertinggi yang memiliki peserta menunggak terbanyak dari 22 Kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu setelah Kecamatan Ponrang sebanyak 1.712 jiwa, Ponrang Selatan sebanyak 1.667 jiwa, Bua sebanyak 1.659 jiwa, Belopa Utara 1.587 jiwa, Belopa sebanyak 1.448 jiwa, Larompong sebanyak 1.418 jiwa, dan Lamasi sebanyak 1.303 jiwa (BPJS Kesehatan Cabang Palopo, 2023). Kecamatan Walenrang Utara memiliki 1 Kelurahan dan 10 Desa.

Dari data sekunder yang diperoleh menunjukkan bahwa dari 4.511 jiwa Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang terdaftar di Kecamatan Walenrang Utara, peserta terbanyak ada di Kelurahan Bosso dengan total peserta sebanyak 774 jiwa (Puskesmas Walenrang Utara, 2023). Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan, maka peneliti tertarik meneliti terkait "Analisis Kepatuhan Pembayaran Iuran Peserta BPJS Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dalam Pemanfaatan Layanan Kesehatan di Kelurahan Bosso Tahun 2023".

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, menggunakan desain penelitian *cross-sectional study*. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Bosso, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu selama bulan Oktober-November 2023. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang ada di Kelurahan Bosso pertanggal 30 Juni 2023, sebanyak 774 peserta dengan jumlah sampel sebanyak 110 orang. Teknik pengambilan sampel dengan teknik *accidental sampling*. Sumber data berasal dari data primer yang diperoleh dari lembar kuesioner dan data sekunder yang diperoleh dari Kantor BPJS Kesehatan Cabang Kota Palopo, Puskesmas Walenrang Utara dan beberapa referensi berupa Jurnal dan penelitian sebelumnya. Analisis yang digunakan adalah analisis univariat dan bivariat.

HASIL

Analisis Univariat

Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Karakteristik Peserta BPJS Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kelurahan Bosso

Karakteristik Individu		n=110	%=100
Status Pekerjaan	Ya	50	45,5
	Tidak	60	54,5
Status Sosial	Bangsawan	19	17,3
	Bukan Bangsawan	91	82,7
Pendidikan	SD	12	10,9
	SMP	42	38,2
	SMA	26	23,6
	D3	12	10,9
	Sarjana	18	16,4
Umur	20-35 Tahun	68	61,8
	36-50 Tahun	35	31,8

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

> 50 Tahun	7	6,4

Sumber: Data Primer 2023

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa sebagian besar responden mempunyai status pekerjaan kategori tidak yakni sebanyak 54,5% responden. Sebagian besar responden mempunyai status sosial kategori bukan bangsawan sebanyak 82,7% responden. Sebagian besar responden mempunyai pendidikan terakhir pada kategori SMP sebanyak 38,2% responden. Mayoritas responden mempunyai rentang umur 20-35 tahun sebanyak 61,8% responden.

Tabel 2. Distribusi *Social Structure, Health Beliefs, Perceived* Terhadap Kepatuhan Pembayaran Iuran Peserta BPJS Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dalam Pemanfaatan Layanan Kesehatan

Variabel	Frekuensi	%
Social Structure		
Cukup	47	42,7
Kurang	63	57,3
Health Beliefs		
Cukup	34	30,9
Kurang	76	69,1
Perceived		
Cukup	92	83,6
Kurang	18	16,4
Kepatuhan		
Patuh	34	30,9
Tidak Patuh	76	69,1

Sumber: Data Primer 2023

Berdasarkan tabel 2 mayoritas responden sebanyak 57,3% memiliki *social structure* kurang terhadap kepatuhan pembayaran iuran peserta BPJS pekerja bukan penerima upah (PBPU) dalam pemanfaatan layanan kesehatan. Mayoritas responden sebanyak 69,1% memiliki *health beliefs* kurang terhadap kepatuhan pembayaran iuran peserta BPJS pekerja bukan penerima upah (PBPU) dalam pemanfaatan layanan kesehatan. Mayoritas responden sebanyak 83,6% memiliki *perceived* cukup terhadap kepatuhan pembayaran iuran peserta BPJS pekerja bukan penerima upah (PBPU) dalam pemanfaatan layanan kesehatan. Mayoritas responden sebanyak 69,1% tidak patuh terhadap pembayaran iuran peserta BPJS pekerja bukan penerima upah (PBPU) dalam pemanfaatan layanan kesehatan.

Analisis Bivariat

Tabel 3. Pengaruh *Social Structure, Health Beliefs,* dan *Perceived* Terhadap Kepatuhan Pembayaran Iuran BPJS Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)

Variabel	Kepatuhan Pembayaran						Nilai p
	Patuh		Tidak Patuh		Total		
Social Structure	**n**	**%**	**n**	**%**	**n**	**%**	
Cukup	27	57,4	20	42,6	47	100,0	0,000
Kurang	7	11,1	56	88,9	63	100,0	
Health beliefs							
Cukup	34	100,0	0	0	34	100,0	0,000
Kurang	0	0	76	100,0	76	100,0	
Perceived							
Cukup	16	17,4	76	82,6	92	100,0	0,000
Kurang	18	100,0	0	0	18	100,0	

Sumber: Data Primer 2023

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan hasil uji *chi square* diperoleh nilai P sebesar 0,000 < α (0,05) dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Hipotesis diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan *social structure*

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

terhadap kepatuhan pembayaran iuran BPJS bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Hasil uji *chi square* diperoleh nilai P sebesar 0,000 < α (0,05) dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan *health beliefs* terhadap kepatuhan pembayaran iuran BPJS bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Hasil uji *chi square* diperoleh nilai P sebesar 0,000 < α (0,05) dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan *perceived* terhadap kepatuhan pembayaran iuran BPJS bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

PEMBAHASAN

Pengaruh Social Structure Terhadap Kepatuhan Pembayaran Iuran BPJS Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)

Social structure merupakan karakteristik individu yang dapat mempermudah atau mendasari untuk terjadinya perilaku tertentu. Individu akan melakukan adaptasi perilaku hidupnya terhadap lingkungannya disamping secara alamiah, juga berkembang perilaku yang sifatnya naluriah. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa mayoritas responden dengan *social structure* kurang dan tidak patuh sebesar 88,9% dalam melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Dari hasil penelitian yang ditemukan di lapangan bahwa memang mayoritas responden hanya merupakan tamatan SMP, bukan dari keluarga bangsawan, dan tidak memiliki pekerjaan.

Temuan lain didapatkan hasil responden dengan *social structure* cukup dan tidak patuh sebesar 42,6%. Salah satu yang menjadi dasar responden untuk tidak patuh melakukan pembayaran yaitu karena BPJS Kesehatan tidak digunakan atau tidak semua orang merasakan sakit setiap bulan bahkan tahunan. Beberapa orang juga mengatakan bahwa melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan bukan merupakan prioritas bagi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor sosial dalam lingkungan sekitar seseorang dapat mempengaruhi keputusan dan perilaku individu terkait kesehatan dan kesejahteraan.

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tsuroyya (2023) bahwa *social structure*, termasuk faktor-faktor sosiologis seperti pendapatan, pekerjaan, dan persepsi, mempengaruhi kepatuhan pembayaran iuran BPJS bagi peserta PBPU (12). Dalam teori struktur sosial, konsep diri dan perilaku individu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti nilai-nilai dan keyakinan pribadi, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti keanggotaan dan identifikasi dengan kelompok-kelompok sosial tertentu (13). Ketika seseorang mengidentifikasi dirinya sebagai anggota suatu kelompok, misalnya komunitas BPJS, hal itu dapat menciptakan rasa memiliki dan kewajiban untuk berkontribusi terhadap kebaikan bersama. Dalam konteks pembayaran BPJS, struktur sosial yang meliputi norma-norma, nilai-nilai, dan ekspektasi dari kelompok tersebut dapat mempengaruhi sejauh mana peserta PBPU merasa terikat untuk mematuhi jadwal pembayaran yang telah ditetapkan.

Peserta BPJS yang merasa kuat identifikasi dan keterikatan dengan komunitas BPJS cenderung lebih patuh terhadap kewajiban pembayaran mereka. Mereka mungkin melihat pembayaran BPJS bukan hanya sebagai tanggung jawab individual, tetapi juga sebagai kontribusi mereka terhadap kesejahteraan kolektif. Hal ini dapat menjadi faktor penting dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan pembayaran peserta PBPU terhadap jadwal yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pemahaman tentang struktur sosial dapat memberikan wawasan yang berharga dalam menjelaskan dan memahami motivasi serta perilaku peserta BPJS terkait dengan kewajiban pembayaran mereka.

Pengaruh Health Beliefs Terhadap Kepatuhan Pembayaran Iuran BPJS Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)

Health beliefs merupakan keyakinan atau kepercayaan individu terhadap pemanfaatan suatu layanan, dalam hal ini pelayanan kesehatan. Setiap individu mempunyai perbedaan tipe dan frekuensi penyakit masing-masing sehingga dari hal tersebut setiap individu mempunyai perbedaan pola penggunaan pelayanan kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa mayoritas responden dengan *health beliefs* kurang dan tidak patuh sebesar 69,1% dalam melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan, sisanya responden dengan health beliefs cukup dan patuh sebesar 30,9%. Temuan yang peneliti dapatkan dilapangan bahwa memang benar memeriksakan

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

kesehatan secara rutin tiap bulannya itu bukan suatu tindakan yang harus bagi mayoritas masyarakat Kelurahan Bosso baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga mereka.

Sebagian besar mengatakan akan melakukan pemeriksaan kesehatan apabila sudah merasakan sakit. Selain itu, mayoritas responden sebesar 56,4% mengatakan tidak setuju dengan diwajibkannya menggunakan BPJS Kesehatan jika hendak melakukan pemeriksaan kesehatan, karena menurut mereka tidak setiap waktu seseorang/individu merasakan sakit parah, jadi untuk melakukan pembayaran secara rutin itu merupakan tindakan yang membuat rugi di beberapa orang. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pentingnya edukasi kesehatan yang baik dan tepat akan memengaruhi perilaku kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan, sehingga Pemerintah dan BPJS Kesehatan perlu meningkatkan program-program edukasi yang fokus pada pemahaman pentingnya iuran BPJS Kesehatan untuk kesehatan individu dan keluarga.

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Seciola et.al (2023) bahwa pengaruh *health beliefs* terhadap kepatuhan pembayaran iuran BPJS bagi peserta PBPU dapat diterangkan melalui teori HBM, yang mendeskripsikan hubungan antara keyakinan atau perilaku pencegahan terhadap gangguan kesehatan dengan faktor-faktor yang berhubungan dengan *health beliefs*. Pada penelitian tersebut, variabel HBM berhubungan dengan partisipasi pasien hipertensi pada Prolanis. Hal ini menunjukkan bahwa *health beliefs* berpengaruh langsung pada kepatuhan pembayaran iuran BPJS bagi peserta PBPU, selain itu dapat mempengaruhi perilaku pencegahan dan pengurangan gangguan kesehatan yang dapat mempengaruhi kepatuhan pembayaran iuran BPJS dalam waktu yang lebih lama (14). Dalam teori *Health Belief Model* (HBM), Model ini menyatakan bahwa perilaku kesehatan dipengaruhi oleh keyakinan individu terkait dengan penyakit, keparahan kondisi, manfaat tindakan pencegahan, dan hambatan yang mungkin dihadapi. Dalam konteks pembayaran iuran BPJS, keyakinan kesehatan peserta PBPU dapat memengaruhi persepsi mereka terhadap manfaat perlindungan kesehatan yang diberikan oleh BPJS, yang pada gilirannya dapat memengaruhi tingkat kepatuhan pembayaran iuran (15).

Pengaruh Perceived Terhadap Kepatuhan Pembayaran Iuran BPJS Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)

Perceived merupakan persepsi masyarakat terhadap sehat-sakit yang erat hubungannya dengan perilaku pencarian pengobatan. Persepsi masyarakat yang baik akan mendorong pemanfaatan layanan kesehatan dan begitupun sebaliknya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa mayoritas responden dengan *perceived* cukup dan tidak patuh sebesar 82,6% dalam melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Hal tersebut diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini memiliki persepsi bahwa menggunakan obat tradisional/berobat langsung ke dukun kepercayaan mereka merupakan suatu tindakan yang positif dibanding harus ke layanan kesehatan, sebagaimana hasil dari pernyataan mereka, mayoritas responden sangat setuju atau sebesar 53,6% dengan pernyataan Pengobatan tradisional/dukun lebih efektif dibanding ke layanan kesehatan.

Dengan kata lain, semakin kuat keyakinan atau persepsi peserta PBPU terhadap manfaat atau kepentingan pembayaran iuran BPJS Kesehatan, semakin tinggi kemungkinan mereka untuk patuh dalam melakukan pembayaran iuran tersebut. Sebaliknya, jika keyakinan atau persepsi mereka terhadap pentingnya pembayaran iuran BPJS Kesehatan rendah, maka kemungkinan untuk patuh dalam melakukan pembayaran juga cenderung rendah. Temuan lain, responden dengan perceived kurang dan patuh dalam melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan, diketahui berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti yaitu karena meskipun melakukan pengobatan tradisional/dukun merupakan pilihan pertama mereka, tapi tidak dipungkiri di beberapa orang mengatakan kalau sakitnya sudah lama mereka akan segera mencari pengobatan ke puskesmas atau rumah sakit. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian responden yang sangat setuju atau sebesar 28,2% dengan pernyataan saat sakit, saya akan segera mencari pengobatan ke layanan kesehatan.

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Situmeang (2021) bahwa persepsi peserta PBPU terhadap kewajiban membayar iuran BPJS Kesehatan berhubungan dengan kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan di RSUD Kotapinang (16). Dalam Teori Planned Behavior (TPB), faktor-faktor seperti niat individu, sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kendali perilaku dianggap memengaruhi perilaku seseorang. Dalam konteks pembayaran iuran BPJS Kesehatan, persepsi Penerima Bantuan Pembiayaan Pemeliharaan Kesehatan (PBPU) terhadap BPJS Kesehatan dapat menjadi faktor penting dalam keputusan mereka untuk membayar iuran secara teratur (17).

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

Persepsi PBPU terhadap BPJS Kesehatan mencakup keyakinan mereka bahwa membayar iuran BPJS Kesehatan secara teratur akan membantu mengurangi risiko kehilangan kesehatan dan kewangan. Jika PBPU percaya bahwa BPJS Kesehatan memberikan manfaat yang signifikan bagi kesehatan dan keuangan mereka, maka mereka mungkin lebih cenderung untuk membayar iuran secara teratur. Selain itu, norma subjektif juga dapat memainkan peran penting dalam keputusan PBPU untuk membayar iuran BPJS Kesehatan. Jika PBPU merasa bahwa orang-orang di sekitar mereka, seperti keluarga atau teman, mendukung keputusan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan secara teratur, maka hal ini juga dapat mempengaruhi niat mereka untuk melakukannya. Persepsi kendali perilaku juga merupakan faktor yang relevan dalam TPB. Jika PBPU merasa bahwa mereka memiliki kendali atas kemampuan mereka untuk membayar iuran BPJS Kesehatan, misalnya melalui pengelolaan anggaran dengan lebih baik atau mencari sumber pendapatan tambahan, maka mereka mungkin lebih termotivasi untuk melakukannya. Dengan demikian, dalam TPB, faktor-faktor ini saling berinteraksi dan dapat mempengaruhi keputusan PBPU untuk membayar iuran BPJS Kesehatan secara teratur.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan *social structure*, *health beliefs*, dan *perceived* terhadap kepatuhan pembayaran iuran BPJS bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dengan nilai P sebesar 0,000 < α (0,05), serta variabel yang paling dominan memiliki pengaruh adalah *health beliefs* dengan nilai P < 0,25.

DAFTAR PUSTAKA

1. Syarifuddin S, Nurcahyo C, Afdal A. Manajemen SDM dalam Penyelenggaraan Program JKN-KIS: Sebuah Tinjauan Literatur. J Jaminan Kesehat Nas. 2021;1(2):166–93.
2. Stiyawan Y, Ainy A. Pemanfaatan Layanan Kesehatan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Kecamatan Jejawi. J Manaj Kesehat Yayasan RSDr Soetomo. 2023;9(1).
3. Mirna Ahmad, Nurmiati Muchlis H. Studi Ketidakpatuhan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Mandiri di Kelurahan Tamalanrea Jaya Kota Makassar. Wind Public Heal J [Internet]. 2021;02(01):87–96. Available from: http://jurnal.fkm.umi.ac.id/index.php/woph/article/view/woph1510
4. BPJS Kesehatan. Panduan Layanan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Dengan Gotong Royong Semua Tertolong. 2023.
5. Basarang M, Asrina A, Ikhtiar M, Prihatin Idris F, Yusriani. Pengaruh Media Edukasi Tentang Hak Dan Kewajiban Peserta Terhadap Perilaku Membayar Iuran Segmen Jaminan Kesehatan Nasional Mandiri Di Kabupaten Enrekang. J Muslim Community Heal [Internet]. 2023;4(3):40–51. Available from: https://doi.org/10.52103/jmch.v4i3.1123JournalHomepage:https://pasca-umi.ac.id/index.php/jmch
6. Fajrini F, A NL, Herdiansyah D, ... Studi Ketidakpatuhan Membayar Iuran BPJS Kesehatan Peserta Non PBI Bukan Penerima Upah di Kelurahan Cempaka Putih Tahun 2018. Muhammadiyah Public Heal J [Internet]. 2021;1(2). Available from: http://repository.umj.ac.id/id/eprint/5258
7. Nurfadillah R. Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Masyarakat Membayar Premi BPJS Kesehatan Kategori Peserta Mandiri di Kelurahan Sudiang Raya. 2019.
8. Nuraeni. Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Iuran Peserta BPJS Mandiri Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. 2020.
9. Ahri RA, Puspitasari AW, Haeruddin H, Yuliati Y, Hardi I, Yusuf RA, et al. Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Citra Merek Terhadap Minat Kembali Pasien Rawat Inap Melalui Kepuasan Sebagai Mediasi Di Rumah Sakit Umum Sisaldjufrie Palu. J Ekon. 2023;7(1):171–84.
10. Yunita A. Hubungan Antara Pengetahuan dan Sikap Masyarakat dengan Pemanfaatan Puskesmas Guguk Panjang oleh Masyarakat di Kelurahan Bukik Cangang Kr Bukitinggi. AFIYAH. 2015;2(2).
11. Mujiati, Pradono J. Faktor Persepsi Dan Sikap Dalam Pemanfaatan Layanan Voluntary Counseling And Testing (VCT) Oleh Kelompok Berisiko HIV/AIDS di Kota Bandung. J Kesehat Reproduksi [Internet]. 2014;5(1):49–57. Available from: https://www.neliti.com/publications/105922/faktor-persepsi-dan-sikap-dalam-pemanfaatan-layanan-voluntary-counseling-and-tes
12. Tsuroyya SL, Maharani C, Studi P, Masyarakat K, Kedokteran F, Negeri U, et al. Systematic Literature Review: Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Peserta PBPU dalam Membayar Iuran JKN Systematic Literature Review: Factors Related to PBPU Participant Compliance in Paying JKN Contributions. J Kebijak Kesehat Indones JKKI. 2023;12(04):193–204.
13. Coleman JS, Muttaqien I, Widowatie DS, Purwandari S. Struktur Sosial Baru dan Ilmu Sosial Baru: Seri Dasar-Dasar Teori Sosial. Nusamedia; 2021.

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

14. Seciola AA, Gayatri RW, Rachmawati WC, Adi S. Analisis Variabel Teori Health Belief Model Dengan Partisipasi Pasien Hipertensi Pada Prolanis Di Puskesmas Kedungkandang Kota Malang. Sport Sci Heal. 2023;5(9):914–27.
15. Ataei P, Gholamrezai S, Movahedi R, Aliabadi V. An analysis of farmers' intention to use green pesticides: The application of the extended theory of planned behavior and health belief model. J Rural Stud. 2021;81:374–84.
16. Situmeang NM. Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dalam Membayar Iuran DI RSUD Kotapinang. 2021.
17. Bandura A. Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective. Annu Rev Psychol. 2001;52(1).

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license